



PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS 1B



**Laporan Hasil Pengawasan Bidang
Triwulan IV tahun 2025
Periode Oktober - Desember 2025**



**Melayani . Amanah . Normatif .
Transparan . Akuntabel . Profesional .**

LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG

TRIWULAN IV TAHUN 2025

(Oktober - Desember 2025)



OLEH

TIM HAWASBID

PENGADILAN AGAMA KUDUS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Pengadilan Agama Kudus periode triwulan IV (Oktober – Desember 2025) dapat terselesaikan.

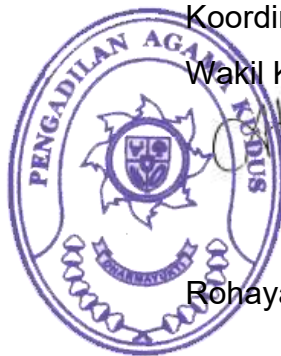
Pengawasan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi peradilan dalam bidang pengawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Kudus, 31 Desember 2025

Koordinator Pengawas Bidang

Wakil Ketua PA.Kudus



Rohayatun, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I ; PENDAHULUAN	5
BAB II ; HASIL PENGAWASAN	9
BAB III ; KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	12
LAMPIRAN : 1. SURAT TUGAS PENGAWASAN	
2. LAPORAN HAWASBID	
3. KONTRAK KINERJA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1050/KPA.W11-A16/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2025 sampai dengan Jumat, 12 Desember 2025 bertempat di Pengadilan Agama Kudus. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut :

1. Rohayatun, S.H.I., M.H. (Koordinator Pengawas Bidang)
2. Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan)
3. Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara)
4. Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan)
5. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan)
6. Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik)

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan

Kondisi

Notulen belum disahkan oleh pimpinan

Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan / Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 5

Sebab

Notulis belum memahami aturan terkait dengan notulensi

Akibat

Hasil rapat belum mendapat pengesahan dari pimpinan

Rekomendasi

Agar notulen hasil rapat bulan-bulan berikutnya dimintakan pengesahan kepada pimpinan.

2. Bidang Pengawasan Administrasi Perkara

Kondisi

Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG.
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.
3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin.
4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9.

Sebab

Ada beberapa boks arsip perkara yang belum diberi keterangan daftar isian boks arsip perkara

Akibat

Tidak dapat dipastikan kelengkapan dan kerapian berkas arsip perkara sehingga akses berkas arsip perkara yang dibutuhkan sulit untuk diakses.

Rekomendasi

Segera dibuatkan daftar isi boks arsip perkara.

3. Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan**Kondisi**

Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung, yang diubah/diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur secara spesifik kewajiban membuat court calendar untuk persidangan elektronik, yang dibagi menjadi dua tahap: tahap jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik) dan tahap pembuktian hingga putusan. Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara, termasuk prosedur pembuatan court calendar.

Sebab

Court calendar belum diisi

Akibat

Jadwal sidang belum terpantau di e-court

Rekomendasi

Mengisi court calendar

4. Bidang Pengawasan Administrasi Kesekretariatan**Kondisi**

Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus tidak memakai atribut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan Tugas.

Kriteria

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI

Sebab

kurang memahami akan peraturan yang ada

Akibat

tidak terlaksananya disiplin kerja sebagaimana ketentuan dalam SK KMA tersebut

Rekomendasi

pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kewajiban menggunakan kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya.

5. Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

Kondisi

Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada meja informasi

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Sebab

Sebelumnya sudah ada Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Kudus, namun Maklumat Pelayanan tersebut belum di cetak dan di tempatkan di Meja Informasi karena Tim PPID tidak mengetahui bahwa Maklumat Pelayanan tersebut harus juga ditempatkan di meja informasi atau paling tidak di PTSP

Akibat

maklumat pelayanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

segera mencetak maklumat pelayanan dan menempatkan di meja informasi atau di PTSP agar masyarakat mengetahui adanya maklumat pelayanan tersebut.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa kekurangan yang masih ditemukan di Pengadilan Agama Kudus. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kudus saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Kudus terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kudus, 31 Desember 2025

Koordinator Pengawas Bidang

Wakil Ketua PA.Kudus



Rohayatun, S.H.I., M.H.

LAMPIRAN

1. Surat Perintah Pelaksanaan Pengawasan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: 1917/KPA.W11-A16/KP7.1/XII/2025

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1050/KPA.W11-A16/PW1.1.1/VII/2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler.

MENUGASKAN

No	Hawasbid	Jenis Bidang
1	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. 196606171991031002 Hakim	Bidang Manajemen Peradilan
2	Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H 199411102017122002 Hakim	Bidang Administrasi Perkara

No	Hawasbid	Jenis Bidang
	Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., 198906122017122001 Hakim	
3	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. 199109212017121002 Hakim	Bidang Administrasi Persidangan
4	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. 198704102011012025 Hakim	Bidang Administrasi Kesekretariatan
5	Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. 198707042017121002	Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

- Untuk :
1. Melaksanakan Pengawasan Bidang sesuai dengan SK Nomor 1050/KPA.W11-A16/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;
 2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
 3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari, mulai tanggal Senin, 08 Desember 2025 sampai dengan Jumat, 12 Desember 2025.
 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Kudus, 05 Desember 2025
Ketua Pengadilan Agama Kudus

[Signature]
Siti Alosh farchaty

2. Laporan Hakim Pengawas Bidang

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025

No	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1	Notulen belum disahkan oleh pimpinan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan / Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 5.	Notulis belum memahami aturan terkait dengan notulensi	Hasil rapat belum mendapat pengesahan dari pimpinan.	Agar notulen hasil rapat bulan-bulan berikutnya dimintakan pengesahan kepada pimpinan.

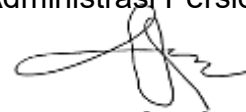
Yang diperiksa
Panitera PA.Kudus



Mahmudi, S.Ag

Kudus, Desember 2025
Pemeriksa

Hakim Pengawas
Administrasi Persidangan



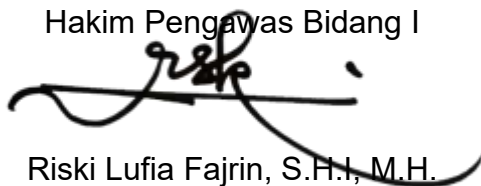
Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
ADMINISTRASI PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

NO.	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG. 2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989. 3. SK KMA No. KMA 01/SK/II/1991, tentang Pola Bindalmin. 4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9.	Ada beberapa boks arsip perkara yang belum diberi keterangan daftar isian boks arsip perkara.	Tidak dapat dipastikan kelengkapan dan kerapian berkas arsip perkara sehingga akses berkas arsip perkara yang dibutuhkan sulit untuk diakses.	Segera dibuatkan daftar isi boks arsip perkara.

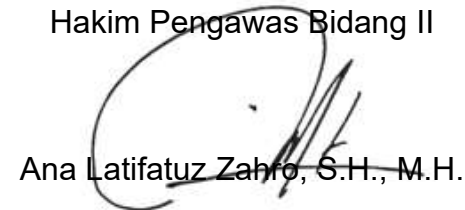
Kudus, 22 Desember 2025
Pemeriksa,

Hakim Pengawas Bidang I



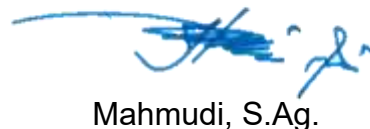
Riski Lufia Fajrin, S.H.I, M.H.

Hakim Pengawas Bidang II



Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.

Yang diperiksa,
Panitera PA Kudus



Mahmudi, S.Ag.

LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
ADMINISTRASI PERSIDANGAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS

No.	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung, yang diubah/diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur secara spesifik kewajiban membuat court calendar untuk persidangan elektronik, yang dibagi menjadi dua tahap: tahap jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik) dan tahap pembuktian hingga putusan. Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara, termasuk prosedur pembuatan court calendar.	court calendar belum diisi	jadwal sidang belum terpantau di e-court	mengisi court calendar

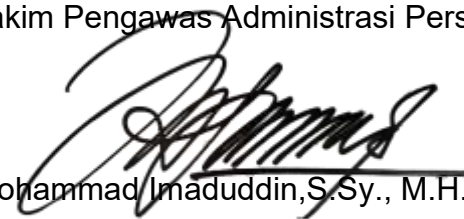
Yang diperiksa
Panitera PA.Kudus



Mahmudi, S.Ag

Kudus, 11 Desember 2025
Pemeriksa

Hakim Pengawas Administrasi Persidangan



Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.,

LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS

No.	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus tidak memakai atribut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan Tugas.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI.	kurang memahami akan peraturan yang ada	tidak terlaksananya disiplin kerja sebagaimana ketentuan dalam SK KMA tersebut;	pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kewajiban menggunakan kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya.

Yang diperiksa
Sekertaris PA.Kudus

Moh. Asfaroni, S.H.I.

Kudus, Desember 2025
Pemeriksa

Hakim Pengawas Bidang
Administrasi Kesekretariatan

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN AGAMA KUDUS

No.	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada meja informasi	1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,	sebelumnya sudah ada Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Kudus, namun Maklumat Pelayanan tersebut belum di cetak dan di tempatkan di Meja Informasi karena Tim PPID tidak mengetahui bahwa Maklumat Pelayanan tersebut harus juga ditempatkan di meja informasi atau paling tidak di PTSP	maklumat pelayanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	segera mencetak maklumat pelayanan dan menempatkan di meja informasi atau di PTSP agar masyarakat mengetahui adanya maklumat pelayanan tersebut

Yang diperiksa

Sekertaris PA. Kudus



Moh. Asfaroni, S.H.I

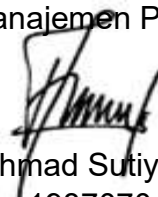
Nip. 198707042017121002

Kudus, ... Desember 2025

Pemeriksa

Hakim Pengawas Bidang

Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik



Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.

Nip. 198707042017121002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

**Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus**

SITUS: <http://www.pa-kudus.go.id/> SUREL infopakudus@yahoo.com

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudi, S.Ag.
NIP : 197212172001121002
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kudus
Nama : Moh Asfaroni, S.H.I
NIP : 197806182003121001
Jabatan : Sekertaris Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Rohayatun, S.H.I., M.H.
NIP : 198211082007042001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal Desember 2025 dan selambat-lambatnya tanggal Desember 2025.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, --- Desember 2025

Pihak Kedua,


Rohayatun, S.H.I., M.H.

Pihak Pertama,


Mahmudi, S.Ag.



Moh Asfaroni, S.H.I



PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS 1B



**Laporan Tidak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang
Triwulan IV Tahun 2025
Periode Oktober - Desember 2025**



**Melayani . Amanah . Normatif .
Transparan . Akuntabel . Profesional .**

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN BIDANG
TRIWULAN IV TAHUN 2025
(Oktober – Desember 2025)



OLEH
PENGADILAN AGAMA KUDUS
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Tindaklanjuti hasil pengawasan Bidang dari Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kudus.

Perlu kami sampaikan bahwa hasil pengawasan yang disampaikan kepada kami telah kami tindaklanjuti sesuai dengan tata peraturan yang ada, hampir seluruh rekomendasi telah kami tindaklanjuti, namun demikian kami yakin masih banyak yang perlu kami sempurnakan dalam upaya meningkatkan kinerja kami dalam memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat.

Mudah mudahan, penyajian laporan tindaklanjuti hasil pengawasan ini diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi kita agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab kita secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Akhirnya dengan mengharap pertolongan Allah SWT semoga laporan hasil tindaklanjuti ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat.

Kudus, 31 Desember 2025

Ketua PA.Kudus



Siti Alosih Farchaty, S.H.I., M.H.

NIP. 198204062006042004

LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. DASAR HUKUM

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1050/KPA.W11-A16/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;
- Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: : 1917/KPA.W11-A16/KP7.1/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang penugasan hakim pengawas bidang untuk melakukan pengawasan triwulan IV tahun 2025 di Pengadilan Agama Kudus;

B. OBJEK PEMERIKSAAN

- 1.Manajemen Peradilan
- 2.Administrasi Perkara
- 3.Administrasi Persidangan
- 4.Administrasi Kesekretariatan
- 5.Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

C. TEMUAN - TEMUAN

1. Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan

Kondisi

Notulen belum disahkan oleh pimpinan

Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan / Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 5

Sebab

Notulis belum memahami aturan terkait dengan notulensi

Akibat

Hasil rapat belum mendapat pengesahan dari pimpinan

Rekomendasi

Agar notulen hasil rapat bulan-bulan berikutnya dimintakan pengesahan kepada pimpinan.

2. Bidang Pengawasan Administrasi Perkara

Kondisi

Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG.
2. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.
3. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin.
4. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9.

Sebab

Ada beberapa boks arsip perkara yang belum diberi keterangan daftar isian boks arsip perkara

Akibat

Tidak dapat dipastikan kelengkapan dan kerapian berkas arsip perkara sehingga akses berkas arsip perkara yang dibutuhkan sulit untuk diakses.

Rekomendasi

Segera dibuatkan daftar isi boks arsip perkara

3. Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan

Kondisi

Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung, yang diubah/diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur secara spesifik kewajiban membuat court calendar untuk persidangan elektronik, yang dibagi menjadi dua tahap: tahap jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik) dan tahap pembuktian hingga putusan. Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara, termasuk prosedur pembuatan court calendar.

Sebab

Court calendar belum diisi

Akibat

Jadwal sidang belum terpantau di e-court

Rekomendasi

Mengisi court calendar

4. Bidang Pengawasan Administrasi Kesekretariatan**Kondisi**

Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus tidak memakai atribut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan Tugas.

Kriteria

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI

Sebab

kurang memahami akan peraturan yang ada

Akibat

tidak terlaksananya disiplin kerja sebagaimana ketentuan dalam SK KMA tersebut

Rekomendasi

pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kewajiban menggunakan kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya.

5. Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**Kondisi****Kriteria**

Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada meja informasi

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Sebab

Sebelumnya sudah ada Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Kudus, namun Maklumat Pelayanan tersebut belum di cetak dan di tempatkan di Meja Informasi karena Tim PPID tidak mengetahui bahwa Maklumat Pelayanan tersebut harus juga ditempatkan di meja informasi atau paling tidak di PTSP

Akibat

maklumat pelayanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

segera mencetak maklumat pelayanan dan menempatkan di meja informasi atau di PTSP agar masyarakat mengetahui adanya maklumat pelayanan tersebut.

TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kudus, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Kudus, 31 Desember 2025

Koordinator Pengawas Bidang

Wakil Ketua PA.Kudus

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Kudus (Kudus Religious Court). The stamp contains the court's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Rohayatun, S.H.I., M.H.

NIP. 198211082007042001

Lampiran Tindak Lanjut

Lampiran 1. Notulen belum disahkan oleh pimpinan

Before



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM. 4, Ds. Dersalam Kec. Dae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438388 www.pa.bahwas.go.id / info@bahwas.go.id

Nomor : 187 / KPA.W11-A16/UND.PW1.1.1/XI/2025 24 November 2025
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Kinerja

Yth. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kudus
di
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, di mohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Kudus
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan
November 2025
Keterangan : Harap hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Siti Alisha Panchayati



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

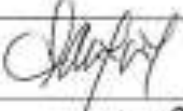
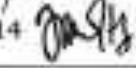



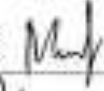

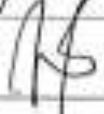
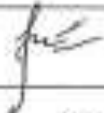
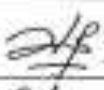
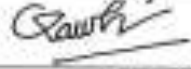


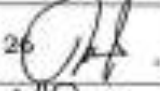
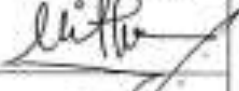




Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Derasalam Kec. Bani, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembastan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	02/01/2025	02/01/2025	03/01/2025

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan November
Hari, Tgl. : Rabu, 26 November 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Pengadilan Agama Kudus

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H.	Ketua	1
2	Rohayatur, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	2
3	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.	Hakim PA Pati	3
4	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.	Hakim	4
5	Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.	Hakim	5
6	Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.	Hakim	6
7	Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.	Hakim	7
8	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.	Hakim	8
9	Mahmudi, S.Ag.	Panitera	9
10	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris	10
11	Sri Inayah, S.H., M.H.	Panmud Hukum	11
12	Qamaruddin, S.H.I., M.H.	Panmud Gugatan	12

13	Siti Khatijah, S.H.	Panmud Permohonan	13	
14	Umardhani, S.H.I.	Kasubbag Umum & Keuangan	14	
15	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	Kasubbag PTIP	15	
16	Amara Asti Faradila, S.H.	Panitera Pengganti	16	
17	Arga Sumarga, S.H.	Panitera Pengganti	17	
18	Nur Fitriani Maulida, S.H.	Panitera Pengganti	18	
19	Drs. Slamet Abadi	Panitera Pengganti PTA Semarang	19	
20	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti PTA Semarang	20	
21	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Pengganti PTA Semarang	21	
22	Dra. Nur Aziroh, M.E.	Panitera Pengganti PTA Semarang	22	
23	Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti PTA Semarang	23	
24	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Juru Sita	24	
25	A Choirul Anwar	Juru Sita	25	
26	Nursjahid	Juru Sita Pengganti	26	
27	Primita Asqofi, S.Kom.	Prakom	27	
28	Eren Gilang Permana, A.Md.	Arsiparis	28	
29	Danny Wulandari, A.Md.A.B.	P. Penanganan Perkara	29	
30	Fadia Ekki Pratomo, S.E.	A. Perencanaan, Eval & Pelaporan	30	
31	Woro Oktaviani, A.Md.	P. Penanganan Perkara	31	

32	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.	Pengelola BMN	32
33	Dwi Hastutiningtyas, S.H.	APP	33
34	Wardah Salsabilla Choirunnisa, S.H.	APP	34
35	Reza Hanafi, S.T.	CPNS APP	35 CS
36	Miftahush Sholikhah, S.H.	CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana	36
37	Aris Setiawan	PPPK	37
38	Abdul Gofor	PPPK	38 CT
39	Moh. Ahlis	PPPK	39
40	Dedy Tri Mulyanto	PPPK	40
41	Muhammad Sahal, S.Kom.	PPPK	41
42	Muhammad Kholiq, S.H.I.	PPPK	42
43	Superwiyanto, S.H.	PPPK	43
44	Zuhridin Anwar Fahim, S.H.I.	PPPK	44
45	Ani Arifah, S.Ag.	PPPK	45
46	Khotimatus Saadah, S.H.I.	PPPK	46
47	Musda Awalisa, S.Kom.	PPPK	47
48	Monika Kurotun Aini, S.H.	Honorar	48
49	Ulfa CH	Honorar	49



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pori KM.4, Ds. Deresdam, Kec. Blah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 75121
Telp. (0291) 436385 stns-pa.kudus@ma.go.id, info@kudus@cybernet.com

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 1867 /KPA.W11-A16/UND.PW1.1.1/XI/2025
Hari : Rabu
Tanggal : 26 November 2025
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Kudus
Acara : Rapat Monev Kinerja Pengadilan Agama Kudus

Peserta Rapat : Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Jalannya rapat:

1. Rapat dibuka oleh Pembawa Acara yaitu, Sekretaris PA Kudus
2. Pembinaan dan pengarahan disampaikan oleh Wakil Ketua PA Kudus bahwa kedisiplinan sangat diharapkan jangan sampai kita kerja asal asalan karena kita tim penegak disiplin, mulai dari pelayanan dan kantor harus bersih dan juga kita mempunyai SDM yg Unggul.
3. Kemudian Pembinaan dan pengarahan disampaikan oleh Ketua PA Kudus Menyampaikan kembali PERMA No 7,8 dan 9 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan Ketua PA Kudus juga menyampaikan bahwa KIP kita ikut Kontestasi, SIPP versi baru harus segera disosialisasikan dan pemetaan Dokumen harus sudah tertata rapi
4. Selanjutnya Sekretaris PA Kudus juga menyampaikan hasil capaian dan evaluasi mulai dari dari Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag PTIP yang juga merangkap sebagai PII, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, hingga pemaperan data dan tindak lanjut perbaikan di bidang administrasi dan tata kelola
5. Selanjutnya Sekretaris PA Kudus juga menyampaikan bahwa surat masuk dan surat keluar harus terukur, surat keluar harus sudah digital dan diarsipkan dan begitu juga surat masuk langsung didisposisi dan diserahkan Ketua, dan surat keluar juga harus sesuai alur dan sudah ditandatangani dan dimintakan nomor surat,



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raja Kertus - Ploj KM.4, Ds. Dersikan Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59021
Telp. (0291) 438385-8080, pa.kudus@ma.go.id, info.pakudus@yahoo.com

6. Sesi berikutnya diisi dengan laporan dari bagian Kepaniteraan, yang disampaikan oleh Panmud Hukum, Panmud Gugatan dan Permohonan. Ketiganya memaparkan kondisi perkara di PA Kudus selama bulan November 2025, baik perkara yang telah diminutasi maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Laporan tersebut menggambarkan dinamika pelayanan peradilan sekaligus menjadi bahan refleksi bersama untuk peningkatan kualitas kerja di masa mendatang.
7. Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama, di mana seluruh peserta aktif memberikan masukan dan solusi terhadap berbagai isu yang dibahas. Kegiatan ditutup dengan doa dan penutup, menandai komitmen bersama untuk terus memperkuat kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
8. Rapat Monev bulan November 2025 ini bukan hanya menjadi agenda evaluatif semata, melainkan juga momentum memperkuat sinergi dan semangat kolektif seluruh aparatur PA Kudus dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Dan dilanjutkan dengan foto bersama setelah ditutup oleh Pembawa Acara.

Notulis

Suparwiyanto, SH
NIP. 197711032025211017

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Agama Kudus

Moh. Asfaroni, SH
NIP. 197806182003121002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM-4, Ds. Dersulang Krt. Dso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 50321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, info@pakudus@yahoo.com

EVIDEN FOTO KEGIATAN RAPAT





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Deresdam Kps, Bw, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 50321
Telp. (0291) 438386 www.pa.kudus.go.id, info@pa.kudus.go.id

EVIDEN FOTO KEGIATAN RAPAT





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Deresolan Kec. Blat, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 50321
Telp. (0291) 436385 www.pa.kudus.go.id, infoptdenda@ymail.com

EVIDEN FOTO KEGIATAN RAPAT



After



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Derandam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pta.kudus.go.id, info@pta.kudus.go.id

Nomor : 187 / KPA.W11-A16/UND.PW1.1.1/XI/2025 24 November 2025
Lampiran : -
Perihal : Rapat Money Kinerja

Yth. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kudus
di
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, di mohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Kudus
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan
November 2025
Keterangan : Harap hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Ketua,

Siti Alish Farchyaty



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**



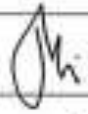
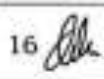

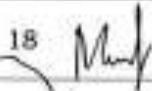

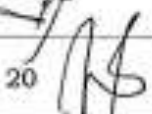
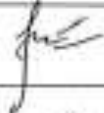
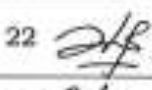




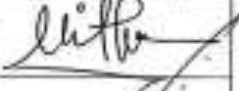
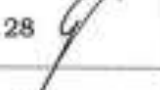


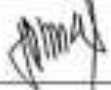
Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Des. Dersalam Kid. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 75321
Telp. (0291) 438385 pa-kudus@ma.go.id info.pakudus@yahoo.com

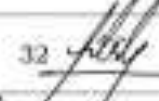
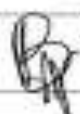
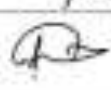
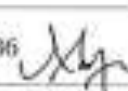





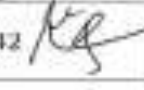



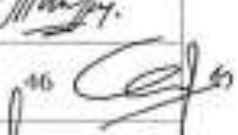

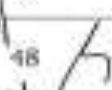

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/04/01	02/01/2025	02/01/2025	03/01/2025

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan November
Hari, Tgl. : Rabu, 26 November 2025
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Pengadilan Agama Kudus

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Siti Alish Farchyaty, S.H.I., M.H.	Ketua	1
2	Rohayatus, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	2
3	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.	Hakim PA Pati	3
4	Rilca Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.	Hakim	4
5	Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.	Hakim	5
6	Riski Lutfa Fajrin, S.H.I., M.H.	Hakim	6
7	Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.	Hakim	7
8	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.	Hakim	8
9	Mahmudi, S.Ag.	Panitera	9
10	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris	10
11	Sri Inayah, S.H., M.H.	Panmud Hukum	11
12	Qamaruddin, S.H.I., M.H.	Panmud Gugatan	12

13	Siti Khatijah, S.H.	Panmud Permohonan	13	
14	Umardhani, S.H.I.	Kasubbag Umum & Keuangan	14	
15	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	Kasubbag PTIP	15	
16	Amara Asti Faradila, S.H.	Panitera Pengganti	16	
17	Arga Sumarga, S.H.	Panitera Pengganti	17	
18	Nur Fitriani Maulida, S.H.	Panitera Pengganti	18	
19	Drs. Slamet Abadi	Panitera Pengganti PTA Semarang	19	
20	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti PTA Semarang	20	
21	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Pengganti PTA Semarang	21	
22	Dra. Nur Aziroh, M.E.	Panitera Pengganti PTA Semarang	22	
23	Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti PTA Semarang	23	
24	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Juru Sita	24	
25	A Choirul Anwar	Juru Sita	25	
26	Nursjahid	Juru Sita Pengganti	26	
27	Primitha Asqofi, S.Kom.	Prakom	27	
28	Eren Gilang Permana, A.Md.	Arsiparis	28	
29	Danny Wulandari, A.Md.A.B.	P. Penanganan Perkara	29	
30	Fadia Ekki Pratomo, S.E.	A. Perencanaan, Eval & Pelaporan	30	
31	Woro Oktaviani, A.Md.	P. Penanganan Perkara	31	

32	Pitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.	Pengelola BMN	32 
33	Dwi Hastutiningtyas, S.H.	APP	33 
34	Wardah Salsabilla Choirunnisa, S.H.	APP	34 
35	Reza Hanafi, S.T.	CPNS Teknis Sarana dan Prasarana	35 
36	Miftahush Sholikhah, S.H.	CPNS APP	36 
37	Aris Setiawan	PPPK	37 
38	Abdul Gofor	PPPK	38 
39	Moh. Ahlis	PPPK	39 
40	Dedy Tri Mulyanto	PPPK	40 
41	Muhammad Sahal, S.Kom.	PPPK	41 
42	Muhammad Khulq, S.H.I.	PPPK	42 
43	Suparwanto, S.H.	PPPK	43 
44	Zuhridin Anwar Fahim, S.H.I.	PPPK	44 
45	Ani Arifah, S.Ag.	PPPK	45 
46	Khotimatus Saadah, S.H.I.	PPPK	46 
47	Mufida Awalia, S.Kom.	PPPK	47 
48	Monika Kurniati Aini, S.H.	Honorir	48 
49	Ulfah CH	Honorir	49 


 Mengetahui
 Sekretaris
 Moh. Achroni, S.H.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Dersahan Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	01/03/2018	-	01/03/2018
Hari/Tanggal	Rabu, 26 November 2025		
Waktu	13.00 WIB -selesai		
Agenda			
Nama Kegiatan	Monev Kinerja Pengadilan Agama Kudus		
Peserta	49 Orang Terlampir		
Pimpinan	Ketua Pengadilan Agama Kudus		

Notulen :

- Pengarahan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus
Dalam pembukaan rapat dinas Panitera memberikan pengarahan sebagai berikut:
 1. Di Bidang Kepaniteraan, Panitera Pengganti harus punya buku kendali, agar tidak terjadi berkas hilang.
 2. Progress kinerja dari Tim Media Sosial sudah banyak mengalami kemajuan terutama dalam kampanye Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
 - 3 Hasil kinerja Tim SIPP Pengadilan Agama Kudus terus ditingkatkan
- Pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus
 - 1.Tahap Pembangunan Zona Integritas saat ini akan dilaksanakan Survey Eksternal, diharapkan survey eksternal ini dilaksanakan secara maksimal.
 2. Survey eksternal yang sedianya dilaksanakan mulai tgl 1 s/d 30 November 2025
 3. Responden yang dibutuhkan sejumlah 100 orang, dan harus ada komunikasi intens dengan responden.
 4. Responden harus dijaring dan prioritaskan responden yang on the spot, baru kemudian responden yg ada di customer list, responden harus diberikan pengarahan dan pengetahuan tentang pelayanan kita.
 5. Responden nantinya akan diberikan semacam reward atau penghargaan karena telah menjadi responden survei eksternal Pengadilan Agama Kudus.
 6. Untuk Desk Evaluasi diharapkan tidak hanya pimpinan yang menjawab apabila ada pertanyaan dari evaluator, tapi semua area harus terlibat dan bisa menjawab agar tidak terkesan satu orang saja yang menguasai.

7. Harus ada komitmen untuk semua warga Pengadilan Agama Kudus dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yaitu berupa peningkatan kinerja internalisasi tugas-tugas, budaya integritas, dan peningkatan pelayanan dengan adanya inovasi-inovasi
8. Zona Integritas bukan merupakan sistem tersendiri tapi merupakan bagian dari sistem yang ada di Pengadilan Agama Kudus

- Pengarahan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kudus

Dalam pengarahannya Sekretaris menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedisiplinan pegawai juga merupakan penilaian dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, maka dari itu absensi Online maupun manual jangan sampai lupa.
2. Untuk keseluruhan pencapaian penyerapan DIPA 04 sudah terserap 96%.
3. Sedangkan untuk pencapaian penyerapan DIPA 01 sudah terserap 96,70% dengan pos belanja pegawai yang banyak menyerap anggaran.
4. Penyerapan Sarana dan Prasarana juga sudah 100%.

- Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus

Dalam pembinaannya Ketua Pengadilan Agama Kudus menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Rapat dinas harus rutin dilaksanakan setiap bulan untuk memantau kinerja.
2. Untuk menjaga kontinuitas kinerja yang baik, akan ada reward tiap bulan untuk hakim dan triwulan untuk pegawai karena berkenaan dengan nilai laporan triwulan, dan reward tahunan untuk kinerja setelah keseluruhan.
3. Dengan adanya Reward Penghargaan bertujuan untuk membentuk Culture Set dan Mindset dalam bekerja secara ikhlas dan tidak pamrih dengan bekerja sebaik-baiknya.
4. Laporan Triwulan perlu ditingkatkan terutama di bagian inovasi isi dengan lengkap agar peringkat penilaian triwulan Pengadilan Agama Kudus naik di triwulan IV

Rapat Dinas Pengadilan Agama Kudus ditutup dengan bacaan Hamdalah.

Mengetahui



Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H.

Sekretaris

Moh Asfaroni, S.H.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, info@pa-kudus.go.id

EVIDEN FOTO KEGIATAN RAPAT





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupatèn Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id info@pa-kudus.go.id

EVIDEN FOTO KEGIATAN RAPAT





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Derasalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id infopakudus@rahm.com

EVIDEN FOTO KEGIATAN RAPAT



Lampiran 2. Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Before

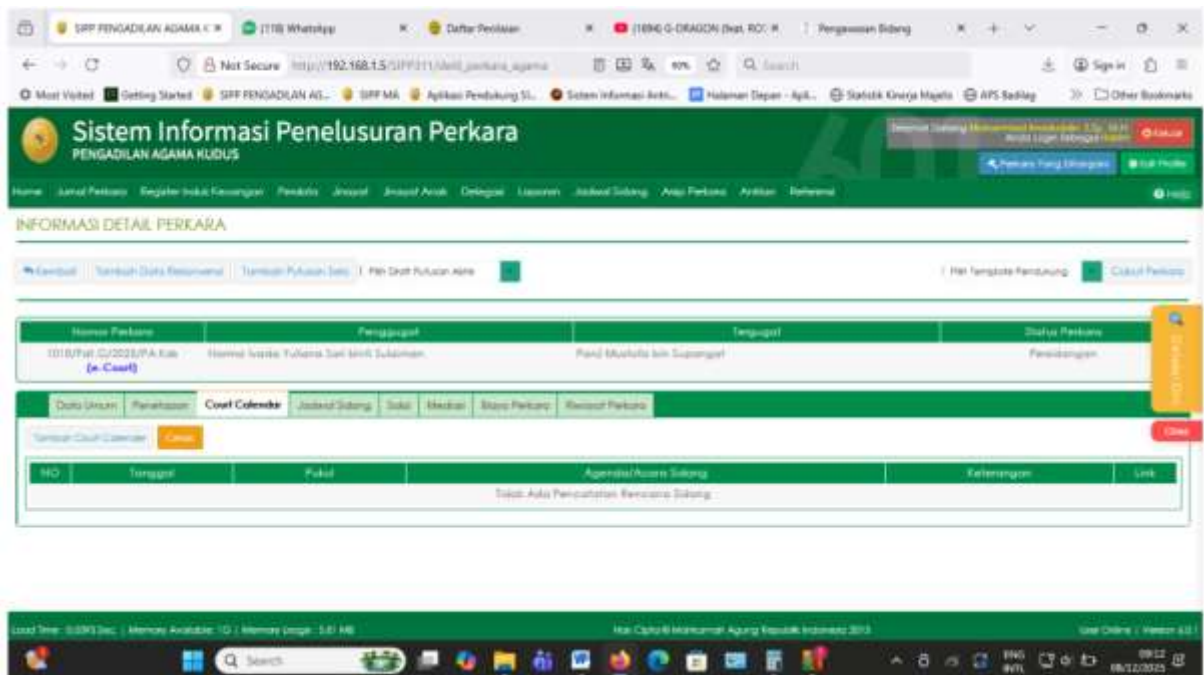


After

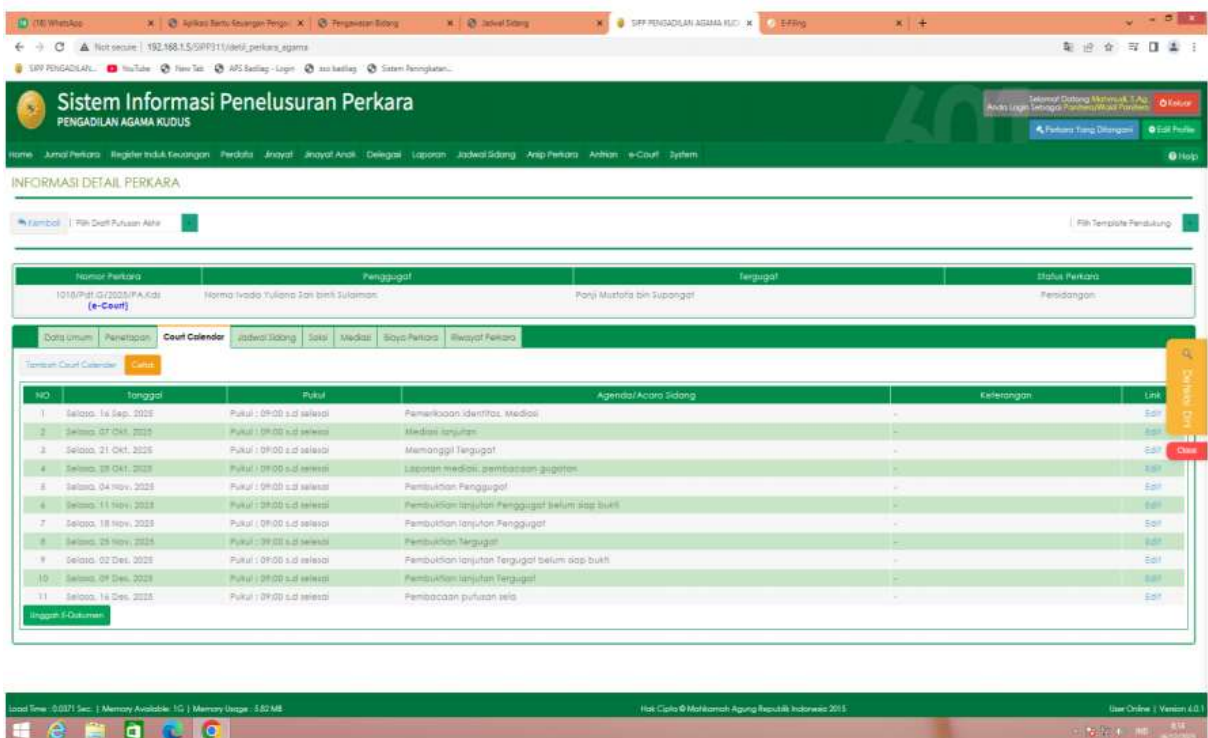


Lampiran 3. Persiapan persidangan secara elektronik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Before



After



The screenshot displays the e-Court application interface. On the left is a dark sidebar menu with options like Dashboard, Daftar Perkara, Pendaftaran Ujaya Hakim, Permohonan Identifikasi TTE, FAQ, and Keluar. The main area shows the user profile 'Muhammad, S Ag (Pantiera/Wakil Pantiera)' at the top right. Below this, there's a section titled 'COURT CALENDAR / RENCANA PERSIDANGAN NOMOR : 1018/Pdt.G/2025/PA.Kas'. It contains a table with columns: No., Tanggal, Jam, Agenda/Acara Sidang, and Keterangan. The table lists 11 sessions from September 16 to December 15, 2025, with various activities like identity verification, mediation, summons, reports, and evidence submission. At the bottom, there's a section for 'PERSIDANGAN NOMOR : 1018/Pdt.G/2025/PA.Kas' with a button to download the calendar as a PDF. A date selector shows 'Selasa, 16 September 2025 09:00:00'.

No.	Tanggal	Jam	Agenda/Acara Sidang	Keterangan
1	Selasa, 16 September 2025	09:00:00	Pemeriksaan identitas, Mediasi	
2	Selasa, 07 Oktober 2025	09:00:00	Mediasi lanjutan	
3	Selasa, 21 Oktober 2025	09:00:00	Menerima Tergugat	
4	Selasa, 28 Oktober 2025	09:00:00	Laporan mediasi, pembacaan gugatan	
5	Selasa, 04 November 2025	09:00:00	Pembuktian Penggugat	
6	Selasa, 11 November 2025	09:00:00	Pembuktian lanjutan Penggugat belum siap bukti	
7	Selasa, 18 November 2025	09:00:00	Pembuktian lanjutan Penggugat	
8	Selasa, 25 November 2025	09:00:00	Pembuktian Tergugat	
9	Selasa, 02 Desember 2025	09:00:00	Pembuktian lanjutan Tergugat belum siap bukti	
10	Selasa, 09 Desember 2025	09:00:00	Pembuktian lanjutan Tergugat	
11	Selasa, 16 Desember 2025	09:00:00	Pembacaan putusan sela	

Lampiran 4. Masih ditemukan pada jam kerja Pegawai Pengadilan Agama Kudus tidak memakai atribut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan Tugas

Before



After





Lampiran 5. Belum tersedia maklumat pelayanan yang diletakkan pada meja informasi

Before

After





